



**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 39 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENJABARAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-.....2

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5272);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2017 terdiri dari:

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 183.133.678.700,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 909.063.377.858,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. 188.822.631.064,01</u>
Jumlah pendapatan	Rp. 1.281.019.687.622,01
2. Belanja	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 465.041.000.762,00
2) Belanja Bunga	Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi	Rp. 549.450.000,00
4) Belanja Hibah	Rp. 12.740.600.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 0,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 1.039.337.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 210.669.830.445,00
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 2.965.961.408,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 639.006.179.615,00
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 43.685.126.822,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 297.666.186.408,00
3) Belanja Modal	<u>Rp. 156.057.609.902,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 497.408.923.132,00
	Jumlah Belanja
	Rp. 1.190.415.102.747,00
	Surplus/(Defisit)
	Rp. 90.604.584.875,01
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 34.031.157.412,43
b. Pengeluaran	<u>Rp. 10.943.615.028,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 23.087.542.384,43
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 113.692.127.259,44

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4.....5

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 29 AGUSTUS 2018

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 29 AGUSTUS 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 39.



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
		3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.289.830.094.925,07	1.281.019.687.622,01	(8.810.407.303,06)	99,32
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	172.891.533.006,19	183.133.678.700,00	10.242.145.693,81	105,92
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	39.156.800.000,00	45.389.522.996,00	6.232.722.996,00	115,92
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.026.727.948,00	3.794.376.569,00	(232.351.379,00)	94,23
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.230.472.927,41	4.230.472.927,41	0,00	100,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	125.477.532.130,78	129.719.306.207,59	4.241.774.076,81	103,38
1.2	DANA PERIMBANGAN	912.626.019.049,38	909.063.377.858,00	(3.562.641.191,38)	99,61
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	67.708.237.049,38	76.910.712.893,00	9.202.475.843,62	113,59
1.2.2	Dana Alokasi Umum	635.999.293.000,00	635.999.293.000,00	0,00	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	208.918.489.000,00	196.153.371.965,00	(12.765.117.035,00)	93,89
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	204.312.542.869,50	188.822.631.064,01	(15.489.911.805,49)	92,42
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	1.853.374.092,00	1.853.374.092,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	67.224.659.869,50	49.881.377.623,01	(17.343.282.246,49)	74,20
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	109.907.883.000,00	109.907.879.349,00	(3.651,00)	100,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	27.180.000.000,00	27.180.000.000,00	0,00	100,00
2	BELANJA	1.312.917.637.309,50	1.190.415.102.747,00	(122.502.534.562,50)	90,67
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	755.612.776.415,57	693.006.179.615,00	(62.606.596.800,57)	91,71
2.1.1	Belanja Pegawai	526.686.394.786,00	465.041.000.762,00	(61.645.394.024,00)	88,30
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	606.744.000,00	549.450.000,00	(57.294.000,00)	90,56
2.1.4	Belanja Hibah	12.775.600.000,00	12.740.600.000,00	(35.000.000,00)	99,73
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.041.337.000,00	1.039.337.000,00	(2.000.000,00)	99,81
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	210.793.954.020,00	210.669.830.445,00	(124.123.575,00)	99,94
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.708.746.609,57	2.965.961.408,00	(742.785.201,57)	79,97
2.2	BELANJA LANGSUNG	557.304.860.893,93	497.408.923.132,00	(59.895.937.761,93)	89,25

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.1	Belanja Pegawai	47.988.044.530,00	43.685.126.822,00	(4.302.917.708,00)	91,03
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	332.855.349.520,43	297.666.186.408,00	(35.189.163.112,43)	89,43
2.2.3	Belanja Modal	176.461.466.843,50	156.057.609.902,00	(20.403.856.941,50)	88,44
SURPLUS / (DEFISIT)		(23.087.542.384,43)	90.604.584.875,01	113.692.127.259,44	(392,44)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	34.031.157.412,43	34.031.157.412,43	0,00	100,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.943.615.028,00	10.943.615.028,00	0,00	100,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.943.615.028,00	10.943.615.028,00	0,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO		23.087.542.384,43	23.087.542.384,43	0,00	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		0,00	113.692.127.259,44	113.692.127.259,44	0,00

TELAH DITELITI OLEH :	
 P. Kabid AKLAP	 Kepala BPKAD
 P. Susteriadi, ME NIP. 19800626 200803 1 001	 Drs. Susteriadi, ME NIP. 19631015 198503 1 005

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN :	
 KASUBBAG POU	 KABAG KUKUM
 HAMBALI, SH NIP. 19760416 200212 1 005	 ALEX PUEWENDI, SH, MH NIP. 19730726 200003 1 003

WA.PUP BUNGO
H. APRIL S. Pd

BUPATI BUNGO,
H. MASHURI



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1. 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Unit Organisasi : 1. 01 . 02 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)		
				(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
4.1.00.00.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah					
4.1.00.00.4.02	Penerimaan Jasa Giro	43.718.800.000,00	44.370.795.751,00	651.995.751,00	101,49	
4.1.00.00.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	43.718.800.000,00	44.370.795.751,00	651.995.751,00	101,49	
4.1.00.00.4.24	Pendapatan dari Dana BOS	43.718.800.000,00	44.370.795.751,00	651.995.751,00	101,49	
4.1.00.00.4.24.01	Pendapatan dari Dana BOS	43.718.800.000,00	44.368.803.294,00	650.003.294,00	101,49	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.00.00.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.00.00.4.01	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.00.00.4.01.06	Dana Bantuan Operasional Sekolah (B O S)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	BELANJA	353.037.003.491,00	318.710.218.765,00	(34.326.784.726,00)	90,28	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	275.625.374.038,00	252.523.101.031,00	(23.102.273.007,00)	91,62	
5.1.00.00.1	Belanja Pegawai	275.625.374.038,00	252.523.101.031,00	(23.102.273.007,00)	91,62	
5.1.00.00.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	184.549.704.266,00	169.099.256.053,00	(15.450.448.213,00)	91,63	
5.1.00.00.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	141.065.323.480,00	133.625.966.098,00	(7.439.357.382,00)	94,73	
5.1.00.00.1.01.02	Tunjangan Keluarga	13.553.455.063,00	12.031.258.184,00	(1.522.196.879,00)	88,77	
5.1.00.00.1.01.03	Tunjangan Jabatan	506.111.200,00	316.530.000,00	(189.581.200,00)	62,54	
5.1.00.00.1.01.04	Tunjangan Fungsional	12.436.872.350,00	11.116.023.000,00	(1.320.849.350,00)	89,38	
5.1.00.00.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	887.834.500,00	803.675.000,00	(84.159.500,00)	90,52	
5.1.00.00.1.01.06	Tunjangan Beras	7.004.838.984,00	6.736.942.920,00	(267.896.064,00)	96,18	
5.1.00.00.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.516.462.123,00	77.524.090,00	(4.438.938.033,00)	1,72	
5.1.00.00.1.01.08	Pembulatan Gaji	2.909.074,00	1.874.604,00	(1.034.470,00)	64,44	

PMK No. 247/PMK/7/2010 Tgl 27 Desember 2010

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.58.08.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.620.000,00	18.354.600,00	(265.400,00)	98,57	
5.2.58.08.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.620.000,00	18.354.600,00	(265.400,00)	98,57	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.852.028.233,00)	(7.066.712.725,00)	1.785.315.508,00	79,83	

Wibp
BUPATI BUNGO,

H. Mashuri
H. MASHURI

TELAH DITELITI OLEH :	
Pt. Kabid AKLAP <i>[Signature]</i>	Kapala PRNAD <i>[Signature]</i>
Pdt. Sudio, SE, MM NIP. 19800626 200803 1 001	Drs. Supriyadi, ME NIP. 19691015 198503 1 005

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN :	
KASUBBAG PUU TGL <i>[Signature]</i>	KABAG. UKUM TGL <i>[Signature]</i>
HAMBALI, SH NIP. 19760416 200212 1 005	ALEK PURWENDI, SH, MH NIP. 19730726 200003 1 003